

FKIP

JURNAL DIMENSI

Vol. 2, No. 1, Januari 2010

ISSN 2085-5877



DAFTAR ISI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONOROGO

Tgl. Pengantar :
No. Inventaris : 2294
Diproses Tgl. :

Halaman

Bias Gender Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Bustanul Athfal Aisyiyah
Kecamatan Jetis, Ponorogo (Kajian Konstuksionistik)

Oleh: Marsudiono

1 - 13

Implementasi KTSP Jenjang Sekolah Pendidikan Dasar (Studi Kasus di
Kabupaten Ponorogo)

Oleh: Sumaji dan Rudianto

14-26

Peranan Teknik 'Constructive Ladder Steps' dalam Memahami Paragraf

Oleh: Djoko Susilo

27-40

Pengaruh Dan Religiusitasnya

Oleh: Subangun

40-56

Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Ponorogo

Oleh: Sunarto

57-78

Penggunaan Microsoft Excel Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Matematika
Di Kelas

Oleh: Julan HERNADI

79-108

Verba Tindak Tutur Dalam Studi Pragmatik

Oleh: Mulyani

109-119

Pembelajaran Dengan Tehnik Media Sebagai Upaya Peningkatan Pengajaran

Oleh: Harry Sumaryanto

120-125

Interferensi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalama Pemakaian Bahasa Inggris
Wacana Tulis (Studi Kasus Pada Siswa SMA Di Ponorogo)

Oleh: Diyah Atiek Mustikawati

126-137

Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Ponorogo

Oleh

Sunarto

Abstrak

Penelitian implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo bertujuan (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo Tahun anggaran 2002, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang mendukung program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut : jelasnya pemahaman tujuan, sangat objektifnya pelaksanaan, sangat baiknya peran masyarakat dalam pelaksanaan, sangat baik keterlibatan masyarakat dalam hasil bantuan, sangat perannya aparat desa dalam pelaksanaan, selalu disiplinnya pelaksanaan dalam melaksanakan. Sangat baiknya kerjasama yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan, baiknya keterlibatan masyarakat dalam monitor dan dukungan pembiayaan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, dan indikator-indikator yang menghambat program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 adalah kurang jelasnya isi, tidak banyaknya media yang digunakan, kurang memadainya staf ahli pelaksana, kurang cukupnya dana operasional bagi pelaksana, kurangnya evaluasi yang dilakukan, tidak lancarnya sistem pencairan dana program Pendukung pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 dapat dinyatakan berjalan dengan baik. Meskipun belum sepenuhnya berhasil tetapi berperan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana dasar, berperan upaya desentralisasi pemerintahan dan berperan memperdayakan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo.

Kata kunci : Implementasi, P2MPD

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menimbulkan akibat yang berlarisung berlarut - larut. Krisis tersebut memberikan konsekuensi sosial, ekonomi dan politik yang sangat besar. Kondisi sosial ekonomi yang terjadi meliputi peningkatan angka pengangguran, peningkatan jumlah penduduk miskin, yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan ancaman kerusakan sosial. Hal tersebut sangat mengganggu laju pembangunan bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih sangat rentan terhadap krisis. Berbagai pendapat menyatakan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan selama hampir 30 tahun telah merempuh strategi yang salah, yang berakibat pada terwujudnya pondasi perekonomian yang rapuh dan rentan. Strategi pembangunan yang dilaksanakan selama itu cenderung bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan peranan pemerintah pusat menjadi sangat dominan. Pemerintah berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pendanaannya. Sedangkan pemerintah daerah dan masyarakat tidak memiliki peranan dan wewenang tentang perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan pembangunan akan tetapi masyarakat hanya pemanfaatannya saja.

Berbagai upaya untuk mengatasi dampak krisis telah banyak dilakukan, diantaranya dengan mengadakan program pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Namun pendekatan atau strategi yang dilakukan lebih berwujud pada pemberian bantuan tambahan pendapatan pada masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut diartikan sebagai masyarakat yang tidak mempunyai daya sehingga disebut sebagai *"passive receiver"*. Hal ini mendorong timbulnya persepsi bahwa usaha pengentasan kemiskinan hanyalah bersifat "bagi-bagi hadiah atau pembagian kue pembangunan", tetapi tidak membuahkan penguatan ekonomi mereka dan hanya menciptakan mental ketergantungan yang berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor -- faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo anggaran Tahun 2002 adalah

- 1. Faktor -- faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo anggaran Tahun 2002**

Pelaksanaan suatu kebijakan pasti ada yang mendukung tapi ada juga yang menghambat. Hal ini disebabkan karena dalam implementasi suatu program harus berhadapan dengan situasi dan kondisi berbeda. Demikian pula halnya dengan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 . Dalam kenyataannya, harus berhadapan dengan masing -- masing individu yang mempunyai tingkat pendidikan, tingkat kepaahaman serta sikap mental yang sangat bervariasi.

Faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor -- faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 adalah:**

- 1). Faktor Komunikasi**

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang mendukungnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut : 1). Jelasnya tujuan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 . 2). 1 kali dalam satu bulan Frekuensi sosialisasi program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 3). lokakarya cara mensosialisasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, mengacu pada analisis data yang dikemukakan oleh Miller dan Huberman (1984) yang mengatakan bahwa analisis data tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu : *Data Collection* (pengumpulan data), *data Reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan).

Adapun analisis data yang dikemukakan Miller dan Huberman tersebut dengan model analisis data interaktif yang digambarkan sebagai berikut : *Data collecting* (pengumpulan data) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian., sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyebaran angket atau kuisioner wawancara dan dokumentasi. Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan data sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalahnya beserta pola - polanya. Karena data yang terkumpul demikian banyak, maka perlu dilakukan *display data* (sajian data) dengan cara membuat model, tipologi, matrik atau tabel sehingga detailnya dapat digambarkan secara jelas (Miller dan Huberman, 1984).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa data yang telah terkumpul direduksi berupa pokok - pokok temuan penelitian yang relevan dengan permasalahan, selanjutnya disajikan data, baik dalam bentuk teks, narasi, grafik, matrik, bagan dan sebagainya, kemudian di tarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Kegiatan analisis interaktif tersebut secara terus menerus berinteraksi dan berputar selama proses penelitian masih berlangsung sampai peneliti memperoleh makna dari permasalahan yang dikaji atau dibahas dalam penelitian ini.

data secara empiris. b. Data Sekunder, yaitu data pendukung atau data pelengkap yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dengan tidak harus terjun langsung pada obyek penelitian. Salah satu kegunaan data sekunder adalah sebagai penguat dasar analisa teori yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

2). Sumber Data.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang Tim Inti (masyarakat desa penerima bantuan, Kasi PMD di Kecamatan selaku penanggungjawab operasional program, Fasilitator Kecamatan, Kunsultan Manajemen Daerah, Unit pengelola proyek, Kepala Desa, Lembaga Ketahanan Desa (LKD), Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diperoleh dari laporan akhir program P2PMD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang karya – karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku – buku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Kuesioner, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara langsung menyampaikan pertanyaan - pertanyaan secara tertulis kepada responden. b. Dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen - dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data apabila data yang diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan dirasa masih kurang atau yang tidak bisa terekam dalam daftar pertanyaan sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

dalam pembangunan daerah, dengan adanya program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Definisi Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa penerima program P2MPD di Kabupaten Ponorogo yaitu 96 (sembilan puluh enam) Desa dari 12 (dua belas) Kecamatan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang merupakan wakil dari populasi tersebut (Soeratio, 1989). Besarnya sampel yang akan diambil untuk memperoleh data sangat tergantung pada sifat populasi, tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia (Albrecht 1991).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan mengambil unit-unit populasi yang dianggap kunci sebagai sampel penelitian berdasarkan pada, sifat dan sumber daya yang tersedia, maka sampel yang akan diambil adalah lima desa yang memiliki prosentase kemiskinan tertinggi yaitu desa Pager Ukir Kecamatan Sampung dengan prosentase kemiskinan 93 %, desa Ronosentanan Kecamatan Siman dengan prosentase tingkat kemiskinan 88,1 %, desa Sahang Kecamatan Ngebel dengan tingkat prosentase kemiskinan 78,1 %, desa Ketonggo Kecamatan Bungkal dengan tingkat kemiskinan 76,5 %, dan desa Kaponan Kecamatan Mlarak dengan prosentase kemiskinan 72,5 % (laporan akhir program P2MPD Kabupaten Ponorogo tahun 2002)

4. Jenis dan Sumber Data

1). Data

masyarakat dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di kabupaten Ponorogo. d. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. e. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. f. Keterlibatan masyarakat dalam melestarikan sarana dan prasarana hasil program Pendukung Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan variabel keberhasilan implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (Y) secara konseptual didefinisikan segala sesuatu yang dapat meningkatnya fungsi prasarana dan sarana dasar, menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktifitas ekonomi pada tingkat lokal. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum, memberdayakan masyarakat kelurahan / desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo (Y) secara operasional dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator berikut : a. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana dasar dengan adanya program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MFD) di Kabupaten Ponorogo. b. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dengan adanya, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. c. Menciptakan lapangan kerja dengan adanya, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. d. Mendukung upaya desentralisasi pemerintahan dengan adanya, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. e. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif

Ponorogo. e. Kecukupan dana / anggaran sebagai penunjang operasional bagi pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Struktur birokrasi (X4) secara konseptual didefinisikan sebagai sesuatu alat untuk menyelesaikan kesulitan dan tuntutan tugas – tugas dalam implementasi kebijakan yang mensyaratkan adanya koordinasi dan kerjasama atau *cooperative*.

Struktur birokrasi, secara operasional dapat diukur dengan menggunakan enam indikator sebagai berikut : a. Kerjasama yang dilakukan pelaksana dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. b. Kinerja struktur organisasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. c. Koordinasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. d. Laporan yang dibuat implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. e. Evaluasi yang dilaksanakan dalam implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. f. Sistem, pencairan dana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Partisipasi masyarakat (X5) secara konseptual didefinisikan segala sesuatu yang dapat mendukung terhadap suatu program baik yang berupa dana, tenaga maupun lainnya yang berasal dari masyarakat. Partisipasi Masyarakat, dapat diukur dengan menggunakan enam indikator berikut : a. Dukungan masyarakat dalam pembiayaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. b. Peran masyarakat dalam proses perencanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo. c. Keterlibatan

mensosialisasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di kabupaten Ponorogo.

Disposisi / Sikap pelaksana (X2) secara konseptual didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh implementor yang akan membawa kebijakan sebagaimana diinginkan. Disposisi / Sikap Pelaksana, secara operasional dapat diukur dengan menggunakan lima indikator sebagai berikut :

- Obyektivitas pelaksana dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Minat pelaksana dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Kedisiplinan pelaksana dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Kemauan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di kabupaten Ponorogo.
- Peran aparat Desa dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Sumber daya (X3) secara konseptual didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendukung personal dalam mengirim informasi kebijakan dan pemberian pelayanan yang meliputi ukuran staf, keahlian, bangunan, sarana / prasarana, tanah dan *supply*.

Sumber daya, secara operasional dapat diukur dengan menggunakan lima indikator berikut :

- Jumlah Staf ahli dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Pengetahuan yang dimiliki fasilitator dan pelaksana lainnya dalam mengimplementasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Kemampuan yang dimiliki pelaksana dalam mengimplementasikan program

deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan latar belakang yang sangat kompleks, memfokuskan pada proses integrasi antar manusia dan memperoleh gambaran-gambaran mendalam faktor-faktor apa yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo

2. Identifikasi dan Definisi Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori pada bab II di atas maka penelitian ini melibatkan lima variabel bebas yaitu komunikasi (X1), Disposisi/Sikap pelaksana (X2), sumber daya (X3), struktur birokrasi (X4), dan partisipasi masyarakat (X5), sebagaimana teori Edward III, Van Metter, Van Horn. Sedangkan variabel terikatnya adalah keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo (Y).

2. Definisi Variabel Penelitian

Komunikasi (X1) secara konseptual didefinisikan sebagai tanggungjawab dan pengetahuan pelaksana tentang suatu kebijakan yang harus dilakukan secara jelas, akurat dan konsisten.

Komunikasi, secara operasional dapat diukur dengan menggunakan lima indikator sebagai berikut : a. Kejelasan tentang tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo. b. Kejelasan tentang isi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo. c. Frekuensi sosialisasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo. d. Media yang digunakan dalam mensosialisasikan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo.

TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. 2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. 3. Mengkaji keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten tahun anggaran 2002.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat baik manfaat akademik maupun manfaat praktis sebagai berikut: 1. Sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian dalam bidang implementasi kebijakan publik, khususnya tentang program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah daerah (P2MPD). 2. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). 3. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti melalui kajian empirik di lapangan dalam melengkapi kajian kongkrit yang didapat dalam penelitian tentang implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada hasil empiris di lokasi penelitian yang dijabarkan dan disusun dengan kondisi lapangan serta berusaha mengidentifikasikan variabel untuk menjelaskan variabel.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tahun 1999 tersebut di atas dan mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintahan Pusat bekerjasama dengan *Asia Development Bank* meluncurkan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) diperlukan partisipasi aktif masyarakat, karena wujud nyata pembangunan sebagai manifestasi dari keinginan dan keinginan dari masyarakat akan dapat terlaksana dan berhasil tanpa mengurangi sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki proses pelaksanaan otonomi daerah serta membantu mempercepat pemulihan dampak krisis, dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat desa, mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin meneliti tentang implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 ? 3. Bagaimanakah implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 ?

diterima dari pemerintah pusat dan langsung kepada masyarakat, selanjutnya diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana JPS yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program, antara lain :1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat mencakup kegiatan masyarakat, kegiatan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P2DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)2. Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) 3. Peningkatan Lapangan Kerja Produksi (PLKP) 4. Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) 5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mencakup Dana Operasional Pemeliharaan PUSKESMAS (DOPP), dan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 6. Pelayanan Pendidikan Dasar, mencakup Dana Operasional dan Pemeliharaan SD (DOP SD / MI), Pembinaan Oleh Raga dan Pemuda.

Permasalahannya, mekanisme penyaluran bantuan – bantuan tersebut diatas, umumnya dilakukan belum didasarkan pada kebutuhan dan keadaan setempat serta belum mengindahkan penggunaannya oleh masyarakat disamping itu kondisi masyarakat penerima bantuan tidak dipersiapkan terlebih dahulu sehingga mereka menerima dan memanfaatkan dana bantuan tersebut sebagai “ Kail “ , bukan sebagai “ ikan “. Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari Wilayah Negara Indonesia tidak berbeda dengan Kabupaten lainnya, bahwa dalam mengatasi dampak krisis ekonomi pada masyarakat, telah melaksanakan proram Jaring Pengaman Sosial (JPS), khususnya program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) sebagai obyek penelitian. Berdasarkan pengamatan sepintas, penerima bantuan langsung untuk masyarakat kebutuhan dan penggunaannya belum terungkap secara jelas. Di samping itu masyarakat penerima belum dipersiapkan dengan pengetahuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi. Hal ini terlihat dalam implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) khususnya di Kabupaten Ponorogo terlalu terburu – buru. Para pelaksana dituntut memenuhi target anggaran, bahwa dana bantuan tersebut harus habis dan

Dampak sosial politik dari krisis yang berkelanjutan dan kegagalan penanganan krisis selanjutnya memberikan dorongan akan penguatan otonomi daerah dan desentralisasi proses pembangunan. Hal ini kemudian mendorong lahirnya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah dan telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang tersebut di atas adalah daerah diberi, wewenang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah selain melaksanakan otonomi juga mendorong untuk memberdayakan masyarakat (*empowerment*) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga sangat relevan dengan perkembangan paradigma pembangunan saat ini yaitu pemerintah yang sebelumnya bersifat dominan dalam pelaksanaan (*provider*) pembangunan menjadi atau berubah sebagai mendorong / fasilitator (*enabler*). Dengan demikian, masyarakat tidak saja menjadi obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan, atau dengan kata lain pembangunan senantiasa bertumpu pada masyarakat (*People Centered Development*).

Selanjutnya ada dua pendapat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain sebagai berikut : a). Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara (Tjokroamidjojo, 1985). b). Meskipun peranan Pemerintah itu demikian pentingnya, namun seluruh unsur masyarakat harus turut serta jika proses pembangunan itu hendak berjalan lancar. (Siagian, 1996)

Berbagai persoalan tentang krisis dan kemiskinan tersebut telah mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, karena semakin berkurangnya sumber pendapatan dan meningkatnya harga bahan – bahan kebutuhan hidup. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat menurun karena daya beli masyarakat menurun, sementara ongkos produksi cenderung meningkat untuk membantu pemerintah meluncurkan program Jaring pengaman Sosial (JPS). Dana JPS

Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, kurang baiknya kemauan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, kurang memadainya jumlah staf ahli dalam program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, kurang cukupnya dana penunjang operasional bagi pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, kadang – kadang dalam melakukan evaluasi terhadap program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, tidak lancarnya sistem pancairan dana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

Ketiga, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 dapat berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya berhasil tetapi berperan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana dasar, berperan upaya desentralisasi pemerintahan dan berperan memberdayakan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo.

2. Saran - saran

Berikut tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, saran yang dapat penulis kemukakan antara lain : a. Dalam menangani hambatan kurang jelasnya isi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 harus ditingkatkan frekuensi dan memperbanyak media yang digunakan dalam mensosialisasikannya. b. Dalam menangani hambatan kurang memadainya jumlah staf ahli dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, harus dicari dan ditempatkan orang – orang yang memiliki disiplin dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. c. Dalam menangani hambatan tidak banyaknya media yang digunakan dalam

program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, sangat baiknya minat pelaksana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, selalu disiplinya para pelaksana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, sangat peranya aparat Desa dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo anggaran, cukup baiknya pengetahuan fasilitator dan pelaksana lainnya dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, baiknya kemampuan yang dimiliki pelaksana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, memadainya jumlah sarana dan prasarana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, sangat baiknya kerjasama yang dilakukan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, cukup baiknya kinerja struktur birokrasi dan koodinasi yang dilakukan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, seringnya laporan yang dibuat pelaksana dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, baiknya dukungan masyarakat dalam pembiayaan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, peran masyarakat dalam perencanaan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, baiknya keterlibatan masyarakat dalam memonitor, mengevaluasi program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, sangat baiknya peran masyarakat dalam pelakasanaan, dan keterlibatan masyarakat dalam melestarikan sarana dan prasarana hasil program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tah in anggaran 2002

Kedua, dari beberapa inkator yang ada, terdapat beberapa indikator yang bisa menghambat keberhasilan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo. Indikator - indikator tersebut adalah kurang ,elasnya isi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pelaksana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, tidak banyaknya media yang digunakan dalam mensosialisasikan program Pendukung

Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang menghambatnya meliputi indikator sebagai berikut (a). Kadang - kadang dalam melakukan evaluasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Tidak lancarnya pencairan dana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002..

2. Keberhasilan Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo 2002.

Keberhasilan implementasi program P2MPD di kabupten ponorogo tahun anggaran 2002 adalah 1). Dapat berperan meningkatkan fungsi sarana dan prosarana dasar terbukti 73,2 % respon menjawab berperan. 2). Dapat berperan upaya desentralisasi pemerintah terbukti 72 % respon menjawab berperan 3). Dapat berperran membedakan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan terbukti 84 % respon menjawab berperan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil analisa terhadap implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002,dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Pertama, dari beberapa indikator yang ada, terdapat indikator - indikator yang mendukung keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. Indikator tersebut adalah jelasnya tujuan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 , 1 kali dalam satu bulan Frekuensi sosialisasi program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, lokakarya cara mensosialisasikan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, sangat obyektifnya para pelaksana

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang menghambatnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Kurang jelas terhadap isi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2PMD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Tidak banyaknya media sosialisasi yang digunakan dalam program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah ((P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

2). Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang menghambatnya meliputi indikator sebagai berikut :a). Kurang baiknya kemauan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

3). Faktor Sumber Daya

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang menghambatnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Kurang memadainya staf ahli dalam program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Kurang cukupnya dana operasional bagi pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

4). Faktor Struktur Birokrasi

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di

dilakukan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Cukup baiknya kinerja struktur birokrasi program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. c). Cukup baiknya koordinasi yang dilakukan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. d). Seringnya laporan yang dibuat pelaksana dan evaluasi yang dilakukan dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

5). Faktor Partisipasi Masyarakat

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang mendukungnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Baiknya dukungan masyarakat dalam pembiayaan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Baiknya peran masyarakat dalam perencanaan, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. c). Baiknya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. d). Baiknya keterlibatan masyarakat dalam memonitor, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. e). Baiknya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. f). Baiknya keterlibatan masyarakat dalam melestarikan, program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

b. Adapun faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 tersebut adalah :

2). Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang mendukungnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Sangat obyektifnya pelaksana dalam melaksanakan program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupten Ponorogo tahun anggaran 2002. b). Baiknya minat pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. c). Selalu disiplinnya para pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. d). Sangat perannya aparat Desa dalam program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggara 2002

3). Faktor Sumber Daya

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang mendukungnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Cukup baiknya pengetahuan fasilitator dan pelaksana lainnya dalam program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 b). Baiknya kemampuan yang dimiliki pelaksana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, c). Memadainya jumlah sarana dan prasarana program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002.

4). Faktor Struktur Birokrasi

Dalam faktor ini, implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, yang mendukungnya meliputi beberapa indikator sebagai berikut :a). Sangat baiknya kerjasama yang

mensosialisasikan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, untuk tahun – tahun yang akan datang perlu diperbanyak media yang akan digunakan dalam mensosialisasikan suatu program bantuan tersebut. d. Dalam menangani hambatan kurangnya kemauan pelaksana dalam melaksanakan program P2MPD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002, maka untuk tahun – tahun yang akan datang perlu dimotivasi / di dorong untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. e. Dalam menangani hambatan kurang cukupnya dana penunjang operasional bagi pelaksana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 harus ditingkatkan dan dipikirkan lebih matang lagi sehingga pelaksanaan program ini lebih baik lagi. f. Dalam menangani hambatan terhadap evaluasi implementasi program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 yang hanya kadang - kadang dilaksanakan oleh pelaksana, maka perlu diberikan penekanan kesadaran yang lebih baik kepada para pelaksana dari pejabat di atasnya bahwa evaluasi sangat diperlukan guna mengetahui pelaksanaan, kelemahan dan kekuatan yang ada dalam pelaksanaan program Pendukung Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002. g. Dalam menangani hambatan tidak lancarnya sistem pencairan dana program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2002 hendaknya untuk tahun – tahun yang akan datang lebih diperlancar dan dipermudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Sosial Formil Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya, Erlangga University Pers

- Duun William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Pres.
- George Ednard III 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC, Congressional Wuarately press
- Islam, Irfan M, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Imawan Riswada, 199. *Metode Penelitian Administrasi, Program Studi Magister Ilmu Administrasi UNTAG Surabaya*.
- _____ 2003. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*.
- _____ Laporan Akhir Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Ponorogo.
- Tangkisan Hesel Nopi , 2002. *Implementasi Kebijakan Publik Lukman offset*, Yogyakarta.
- _____ 2002. *Pedoman Umum Program P2MPD Pusat*.
- Sugiyono, 1992. *Metode Penelitian Administrasi*.
- Singarimbun, Mastri, 1995. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES.